



LAPORAN PENELITIAN
STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB

KK-2

305.42

UIG

W-1

WANITA DALAM INTERPRETASI SOPAN SANTUN PADA WACANA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Peneliti :

Dra. SRI WIRYANTI BUDI UTAMI, M.Si.

Dra. SUDIYAH, M.A.

Dra. ADI SETYOWATI, M.Hum.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan

DIP Nomor : 019/XXIII/3/--/1999 Tanggal 1 Juni 1999

Kontrak Nomor : 022/P2 IPT/DPPM/99/SKW/1999

Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud

Nomor Urut : 1

3000 113003141

PUSAT PENELITIAN / STUDI WANITA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Januari, 2000

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
DOSEN MUDA DAN KAJIAN WANITA

1. a. Judul Penelitian: WANITA DALAM INTERPRETASI SOPAN-SANTUN
PADA WACANA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
b. Katagori Penelitian I/II/III
2. Kepala Proyek Penelitian
 - a. Nama lengkap dan Gelar : Dra. Sri Wiryanti B.U., M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Golongan dan NIP : Asisten Ahli/IIIb/131573901
 - d. Jabatan Fungsional : Dosen
 - e. Fakultas/Jurusan : SASTRA-UNAIR, Bahasa dan Sastra
 - f. Universitas : Airlangga
 - g. Bidang Ilmu Yang Diteliti: Sosio-Pragmatik
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 orang
4. Lokasi Penelitian : Jawa Timur
5. Kerjasama
 - a. Nama instansi (kalau ada) -
 - b. Alamat
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Surabaya, 20 Desember 1999

Mengetahui

Kepala Fak/KaPuslit Studi Wanita
Universitas Airlangga

Susanti, MA.

NIP. 131406097

Kepala Proyek Penelitian

Dra. Sri Wiryanti BU., M.Si.

NIP. 131573901

Disetujui oleh

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Airlangga,

Prof. Dr. Nor Cholies Zaini

NIP. 130355372

RINGKASAN

WANITA DALAM INTERPRETASI SOPAN SANTUN PADA WACANA

PROSES PENGEMBALAN KEPUTUSAN

(Sri Wiryanti Budi U., Adi Setyowati, Sudiyah; 1999, 49 Halaman)

Sebagai tindak komunikasi, wacana melibatkan tiga fungsi, yakni 1) pengungkapan isi, 2) pengungkapan hubungan sosial, dan 3) pengungkapan sikap pribadi yang terlibat. Oleh karena itu manifestasi wacana dapat untuk melihat realitas sosial yang ada.

Merujuk realitas sosial yang ada dapat dikatakan masih terjadi paradoks dalam diri wanita. Peluang publik yang dimasukinya belum sepenuhnya dapat menyalurkan akses dimilikinya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui konteks yang menjadi kendala wanita dalam menyalurkan akses pada proses pengambilan keputusan, serta pengaruhnya dalam interpretasi sopan-santun pada proses pengambilan keputusan.

Dari kajian teoritik diketahui ketidaktegasan tindak tutur dalam budaya Jawa merupakan tindak-kesopanan yang merefleksikan perasaan tidak cocok, membuat malu, atau perasaan tidak suka, namun di sisi lain juga mengisyaratkan pada perasaan gembira atau sikap setuju.

Penerapan budaya male chauvinism dalam budaya Jawa menyebabkan bias gender yang cukup transparan, karena seseorang akan didudukan berdasarkan identitas gender dan peran gender sesuai dengan jenis kelaminnya. Bias gender akan mempengaruhi status dan wewenang yang dimiliki wanita. Seperti diketahui dalam budaya Jawa wanita dianggap memiliki status yang lebih rendah dibanding pria.

Melalui pendekatan kualitatif dengan terapan metode diskriptif dan hermenitik dengan setting komunitas perumahan yang dihuni mayoritas wanita bekerja dari keluarga suku

Jawa, ditemukan kecilnya akses wanita dalam proses pengambilan keputusan karena pengaruh konteks. Konteks yang dimaksud adalah konteks sosial maupun konteks situasi.

Faktor konteks sosial yang menjadi kendala wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan bersumber pada ideologi gender yang mengarah pada kepantasan dan stereotipikal wanita. Wanita masih didudukkan dalam peran sebagai ibu rumah tangga yang hanya memiliki wewenang dalam masalah domestik. Demikian pula, sebagai wanita harus selalu menjaga perilaku hormat yang dekat dengan sifat wedi (takut), isin (malu) dan sungkan (isin).

Stereotipikal dan peran yang ada pada wanita berpengaruh pada interpretasi sopan-santun dalam proses pengambilan keputusan. Dalam refleksinya wanita memakai strategi ketidaktegasan dengan menekankan pada maksim kedermawanan, kerendahan hati, kesepakatan dan simpati.

Mengacu temuan tersebut, disarankan dalam mengatasi ketimpangan gender dan hegemoni patriarki, wanita harus mengubah wacana mereka. Tindak sopan-santun tak perlu ditinggalkan sejauh etika pergaulan bukan untuk menyerahkan putusan yang berarti pasif tidak responsif dalam proses pengambilan keputusan.

(L.P. Pusat Penelitian / Studi Wanita Universitas Airlangga;

022/P2IPT/SKW/VI/1999, 1 Juni 1999)

SUMMARY

WOMEN IN DISCOURSE OF INTERPRETATING POLITENESS
IN DECISION MAKING PROCESS

(Sri Wiryanti Budi U., Adi Setyowati, Sudiyah; 1999, 49 Pages)

As a speech act, discourse involve three functions :
1) impresion of content, 2) impresion of social relationship, and 3) impresion of personal relationship. Therefore a discourse manifestation can be used to discover the existing social reality .

Looking at a social reality around us, that is still a paradox in women life. Public opportunity which is available for her can't be fully used, especially in decision making process.

This research aims to discover the context which becomes the obstacles for women decisive decision and the impact in interpreting politeness in decision making process.

From the theoretical studies, it is known that indirect speech act in Javanese culture is a polite act which reflects disagreeable feeling, conflict avoidance or dislike feeling, but on the other side it also signifies happy feeling or act of agreement .

Cultural practice of male chauvinism in Javanese culture makes gender bias quite transparent, because a person will be positioned based on gender identity and gender role suitable with her/his sex. This gender bias

will influence status and authority are owned by women. As it is known in that culture, women have a lower status than men.

Through qualitative approach, descriptive and hermeneutic methods in a setting Javanese community in housing areas which most of women work, it is found out that there are quite a few accesses to decision making process.

The condition above is caused by the social contexts and situational contexts. The factor of social context which becomes the women discourse handicaps in decision making process, comes from the assumption about the role of women and the value of women stereotyp. Tending to be women stereotyp. That the role of housewife is only in domestic affairs. Besides, women must care about politeness.

Stereotype and role of women influence their polite interpretation in the process of decision making. In her reflection women use strategy of indirectness, stressing in kindness maxim, honesty, agreement and sympathy.

Referring to the finding, it is suggested that to overcome problem of gender and patriarchal hegemony, women have to change their discourse. Polite need not be abandoned except for social etiquette. So this is not intended to put women on passive position.

(Rest. Inst. Center For Research On Womenhood Airlangga University;
022/P2IPT/SKW/VI/1999, June 1, 1999)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penelitian ini terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Laporan penelitian ini dibuat dalam kerangka proyek penelitian yang dibiayai dari dana DP3M/Kajian Wanita/1999 melalui SK. Rektor No. 588/J03.2/PG/1999 Universitas Airlangga.

Penelitian ini merupakan tanggapan terhadap permasalahan gender yang masih ada di masyarakat kita, yakni dalam lingkup wacana pada proses pengambilan keputusan, yang penulis pandang sebagai bagian dari proses menuju kesetaraan gender.

Terselesainya penelitian ini sampai pada penulisan laporan tentunya tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung:

1. Rektor Universitas Airlangga berkenaan dengan penebitan surat keputusan mengenai penelitian ini.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga berkenaan dengan arahan teknis keberlangsungan penelitian ini.
3. Lembaga pemberi dana sehingga terselenggara penelitian ini.
4. Dekan FISIP dan Dekan Fakultas SASTRA.
5. Para anggota peneliti, teman sejawat, dan mahasiswa yang telah membantu dan memberi masukan.
6. Para pemuka kampung dan informan di lingkup perumahan yang

dijadikan setting penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan dengan sangat kooperatif dalam proses penyediaan dan analisis data.

Terima kasih kami ucapkan pula kepada sejawat-sejawat dari Fakultas Sastra yang menghadiri seminar serta memberikan banyak masukan yang bernilai terhadap laporan ini, sehingga dapat penulis sempurnakan. Sudah barang tentu terdapat kekurangan-kekurangan yang ada yang tak menutup kemungkinan saran dan pendapat guna perbaikan dan kesempurnaan penelitian masalah ini.

Surabaya, 20 Desember 1999

Ketua Peneliti dan Tim

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL PENELITIAN	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kerangka Teoritis	5
2.2 Operasionalisasi Konsep	11
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
3.1 Tujuan Penelitian	13
3.2 Manfaat Penelitian	14
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	15
4.1 Pendekatan Yang Dipakai	15
4.2 Teknik Pencarian Data	15
4.3 Analisis Data dan Kesimpulan	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	19
5.1 Profil Wacana di Lingkup Komunitas	19
5.1.1 Komunitas Perumahan	19
5.1.2 Profil Wacana Wanita	22

5.2 Konteks Yang Mempengaruhi Wacana	25
5.2.1 Konteks Sosial	25
5.2.2 Konteks Situasi	34
5.3 Prinsip Sopan-Santun	35
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	44
6.1 Simpulan	44
6.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wacana sebagai tindak komunikasi yang memiliki fungsi utama dalam kegiatan transaksional maupun interaksional (Brown & Yule, 1996:1). Maka wacana dipandang sebagai keseluruhan tindakan yang berkaitan dengan konteks situasi dan sosial. Wacana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mencerminkan sistem hubungan sosial. Sebagai bentuk pragmatik bahasa, wacana mengekspresikan berbagai makna sosial.

Wacana melibatkan tiga fungsi, yakni : 1) pengungkapan isi, 2) pengungkapan hubungan sosial, 3) sikap pribadi yang terlibat. Fungsi tersebut menegaskan bahwa wacana sebagai ujaran bukan suatu hasil yang bersifat semena-mena atau pilihan individu semata, melainkan memiliki pola yang mencerminkan implikatur yang mendasari suatu sistem hubungan sosial. Wacana tidak hanya merupakan produk yang berupa untaian satuan lingual yang bebas nilai dan bersifat otonom. Tetapi selalu merefleksikan nilai sosial budaya partisipan yang terlibat dan situasi sosial wacana berlangsung.

Oleh karena itu, wacana yang termanifestasi dalam perilaku kebahasaan dapat dipakai melihat realitas sosial. Seperti dinyatakan bahwa wacana yang berkembang di kompleks

perumahan atau keluarga muda merujuk suatu realitas sosial adanya kelas menengah, dan perilaku kebahasaan yang berorientasi pada suasana penggunaan --siapa saya ini dan sedang berbicara kepada siapa-- menuju perilaku kebahasaan yang berorientasi pada status penutur --karena saya anggota golongan X, maka saya menggunakan ragam X. (Dede Oetomo, dalam Yudi Latif, 1996:198).

Merujuk realitas yang ada dewasa ini, wanita masih terpaku dalam peran domestik. Mereka belum sepenuhnya memanfaatkan akses publik kendati di antara mereka telah banyak yang meraih peluang publik. Fenomena ini dapat diamati dari sifat keorganisasian, tabloid wanita, juga topik-topik wacana yang berkembang dalam pembicaraan di antara mereka masih berkutat di seputar peran domestik, seperti upaya menjaga penampilan diri, busana, menu masakan, dan lain-lain.

Kenyataan di atas senada apa yang ditegaskan dalam pendapat bahwa peluang-peluang publik yang sudah terbuka bagi wanita, masih menimbulkan paradoks bagi wanita (Daniel Dhakidae, 1994:45). Wanita telah memiliki peluang untuk mengembangkan wacana publik yang ada dalam lingkungan masyarakatnya, tetapi peluang tersebut belum dimanfaatkan.

Keadaan semacam ini menyebabkan wanita sulit lepas dari wacana domestik. Konsekuensinya, wanita tidak memiliki kesempatan membenahi ketimpangan wacana mereka, sekaligus memanfaatkan pendayagunaan sumber daya yang dimilikinya. Hal

ini terungkap dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa kendati wanita sudah bekerja, namun mereka umumnya tidak berani turut serta dalam proses pengambilan keputusan; profil budaya politik antara responden yang bekerja dan yang tidak bekerja pada esensinya sama, yakni tidak ada keinginan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan. (Djoko Sulisty, 1995:99).

Paradoks yang dihadapi wanita mengisyaratkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam berwacana pada proses pengambilan keputusan. Posisi wanita masih termarginalisasi oleh norma-norma kultural yang bersumber pada ideologi gender dan sistem sosial yang memberlakukan wanita dalam status inferior. Hal ini tercermin dari masih sedikitnya wanita yang bisa menduduki posisi sebagai pengambil keputusan. Seperti di lembaga DPR, jumlah wanita hanya seperdelapan dari jumlah keanggotaan pria (Trisakti Handayani, 1994:15). Demikian pula terlihat di lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun swasta hampir dapat dikatakan wanita tidak memiliki kekuasaan menentukan dalam pengambilan keputusan. Wanita masih dalam peluang yang sangat kecil dalam proses pengambilan keputusan (Marilee Karl, 1995:59).

Peran sosial yang disandang wanita dan lingkungan sosial budaya mempengaruhi prinsip-prinsip sopan-santun yang dipakai wanita dalam wacananya. Sebab faktor status atau kedudukan, di samping peranan sementara seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sangat mempengaruhi interpre-

tasi sopan-santun dalam percakapan (Brown dan Gilman dalam Geoffrey Leech, 1993:64).

Mengacu status sebagai sumber kuasa yang berperan dalam proses pengambilan keputusan, maka dimungkinkan dalam peristiwa tersebut, interpretasi sopan-santun wacana wanita merefleksikan keberadaannya.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada fenomena tersebut, penelitian ini mengkaji lebih lanjut:

1. Bagaimanakah profil wacana wanita di lingkungan komunitasnya?
1. Konteks apakah yang mempengaruhi wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan ?
2. Prinsip sopan-santun dan makna apakah yang terkandung dalam wacana wanita pada proses pengambilan keputusan ?

1.3 Pembatasan Masalah

Proses pengambilan keputusan dapat terjadi pada situasi formal dan non formal. Topik yang dibahas dapat menyangkut hal yang bersifat publik dan domestik. Maka dalam penelitian ini dipandang perlu membatasi lingkup masalah yang dibahas, yakni pada proses pengambilan keputusan dalam setting kelompok komunitas di lingkup perumahan dengan hunian mayoritas dari suku Jawa. Topik proses pengambilan keputusan yang menyangkut permasalahan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Bias gender yang mempengaruhi wacana wanita merupakan gambaran realitas dari status dan peran yang diatur oleh masyarakatnya. Dalam hal ini seperti dinyatakan pendapat berikut:

"Linguistic differences are merely a reflection of social differences, and as long as society views women and man as different and unequal then differences in the language of women and men will persist" (Coates dalam Gradoll & Swamm, 1989:8).

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa bias gender merupakan refleksi dari perbedaan sosial di masyarakat yang membedakan pria dan wanita. Status dan peran sebagai identitas sosial individu dapat ditunjukkan oleh bentuk-bentuk wacana yang menyangkut: sikap berbahasa, aksen, kualitas suara, serta istilah yang dipakai. Seperti ditegaskan oleh Giles bahwa pria dan wanita dapat mengekspresikan wacana yang memberikan isyarat gender mereka masing-masing dalam konteks yang sama dan identitas bersama sebagai anggota suatu kelompok (Ibrahim, 1992 : 139-140).

Hampir semua studi sosiolinguistik yang melibatkan contoh wacana wanita dan pria memiliki bukti mengenai perilaku linguistik, yang menggambarkan kekhasan wacana wanita. Beberapa hasil penelitian yang diungkapkan dalam penegasan Chambers (1995) merujuk : Wolfram (1969:76) menyatakan bahwa wanita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar terhadap evaluasi ciri-ciri istimewa linguistik secara sosial daripada pria. Labov (1972 :243), wanita lebih berhati-hati dalam bertutur dibandingkan pria, dan wanita lebih sensitif daripada pria terhadap pola prestise (gengsi). Wolfram dan Fasold (1974 :93), wanita lebih peka akan norma-norma kesadaran prestise yang lebih tinggi dalam semua bentuk wacana, baik aktual maupun yang tercermin dalam sikap. Romaine (1978:156), wanita senang menggunakan atribut yang ditekankan oleh norma-norma lokal dan status dalam bertutur. Trudgill (1983 :161) , wanita selalu mengkaitkan wacananya dengan variabel seperti usia, pendidikan dan kelas sosial.

Kekhasan wacana wanita juga ditandai ciri non-verbal. Prawitasari (1993) menyimpulkan dalam sikap bertutur wanita memiliki kekhasan. Rosenthal, dkk (1979), wanita lebih baik daripada pria dalam membaca ekspresi non-verbal. Grinder (1978) & Rokenkranzt, dkk dalam Watson (1984), wanita lebih menyadari perasaan orang lain daripada pria. Maccoby dan Jacklin (1974) menyimpulkan secara umum wanita lebih sensitif terhadap isyarat sosial daripada laki-laki.

Mengacu hal di atas, wacana dan gender merupakan dua

hal yang berlaku dalam kegiatan masyarakat dan saling mempengaruhi, maka wacana selalu merefleksikan ketidaksamaan sosial yang terbentuk karena perbedaan seksual dan secara aktual diciptakan melalui wacana (Gradoll & Swamm, 1989:5).

Paradoks yang dihadapi wanita dalam mengembangkan wacana mereka di ranah publik akibat dari ideologi sosial yang berlaku. Jurgen Habermas mengisyaratkan bahwa proses sosial politik tidak selalu berada dalam "praksis kerja" terbatas pada sarana teknis tetapi juga dalam "praksis komunikasi" yang penguasaan sosialnya berada dalam sistem reproduksi ideasional yang terungkap dalam wacana (Latif, 1995:16).

Stereotip wanita selalu berbicara pelan, lemah lembut, peka pada perasaan orang lain, emosional, irasional, ragu-ragu, pasif merupakan kendala yang cukup serius dihadapi oleh wanita dalam partisipasi mereka di ranah publik. Wanita dipandang kurang memiliki sifat kepemimpinan atau sebagai pengambil keputusan. Seperti ditegaskan bahwa kepemimpinan harus memiliki idealisme kuat, berani mengambil keputusan, berani menunjukkan kelebihan, kepandaian dan ketrampilan (Soekanto, 1986:267). Kesemua ini dianggap jauh dari sifat wanita. Simone de Beauvoir (1995:100) menegaskan bahwa wanita selalu kehilangan "Aku"-nya bukan karena kodratnya, tetapi disubordinasikan oleh "Aku" pria.

Konsep gender cukup kentara berlaku dalam lingkungan masyarakat Jawa. Dalam masyarakat ini ditekankan bagaimana wanita harus berperilaku dengan memelihara "sikap" yang

baik dan sopan, serta berlaku hormat. Hildred Geertz (1983,116) mendiskripsikan perilaku "urmat" sebagai perilaku yang diwakili oleh tiga istilah "wedi" (takut), "isin" (malu) dan sungkan merupakan pedoman perilaku yang mengacu pada kesopanan sosial akan pengendalian diri dan menghindari celaaan. Maka wanita selalu berhati-hati, harus pandai "olah sikap" dalam berpendapat agar tidak mendatangkan celaan.

Tindak kesopanan bahasa merupakan refleksi tindakan yang terpengaruh oleh nilai dan norma masyarakat budayanya. Karena pada dasarnya setiap masyarakat budaya memiliki etika kesantunan berbahasa sebagai media yang mengatur hubungan di antara anggotanya. Melalui pendekatan fungsionalisme bahasa terungkap, kendati kesopanan bahasa bersifat semesta manifestasinya berbeda-beda menurut masyarakat budayanya.

Asim Gunarwan (1993) menegaskan bahwa masalah kesopanan bahasa adalah spesifik kebudayaan dari masyarakat bersangkutan. Dalam masyarakat budaya Jawa, ketidaktegasanan pernyataan merupakan refleksi dari tindakan kesantunan. Sebab ungkapan yang tidak langsung dianggap salah satu upaya untuk tidak menunjukkan ketidaksenangan, ketidakcocokan, atau mempermalukan. namun di sisi lain sebagai ungkapan rasa kegembiraan dan kesepakatan. Seperti diungkapkan dalam penelitian Hildret Geertz tercermin dalam tiga istilah 'wedi' (takut), 'isin' (malu), dan sungkan merupakan pedoman perilaku yang mengacu pada kesopanan sosial akan pengendalian diri dan menghindari celaan.

Tindak kesopanan dalam wacana berkaitan dengan implikatur. Istilah implikatur dipakai oleh Grice (1975) untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur. Implikatur adalah bagian dari ujaran yang menentukan suatu ujaran itu komunikatif. Maka implikatur didasarkan pada beberapa prinsip hubungan di antara penutur dalam konteks komunikasi.

Konteks mengarahkan prinsip-prinsip tuturan yang dipakai, salah satunya adalah prinsip sopan-santun, sebagai hal yang mengatur agar tuturan terdengar santun oleh pendengar atau lawan bicara kita. Menurut Lakoff dalam Asim Gunarwan (1994), kaidah sopan-santun mencakup tiga hal, yakni:

1. formalitas jangan memaksa atau jangan angkuh',
2. ketaktegasan buatlah sedemikian rupa sehingga lawan bicara anda dapat menentukan pilihan, dan
3. persamaan atau kesekawanan bertindaklah seolah-olah anda dan lawan bicara anda sama atau dengan kata lain membuat rasa senang'.

Brown dan Levinson menjelaskan tindak kesopanan tercermin pada penutur akan "menghitung" derajat keterancaman sebuah tuturan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

1. jarak sosial di antara penutur dan pendengar,
2. besarnya perbedaan kekuasaan atau dominasi di antara keduanya, dan
3. status relatif jenis tindak ujaran di dalam kebudayaan

yang bersangkutan.

Berdasarkan faktor tersebut penutur memilih strategi sopan-santun yang akan dipakai.

Menurut Leech (1993) prinsip kesopanan memiliki peranan yang lebih tinggi daripada prinsip kerja. Dalam situasi tertentu prinsip kesopanan memiliki efek yang menentukan bagi berlangsungnya suatu hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Seperti ditegaskan Fraser (1978) bahwa tindak kesopanan bagian dari aktivitas ujaran dengan mempertimbangkan apakah lawan bicaranya tidak terlampaui haknya dan apakah penutur sudah memenuhi kewajibannya, demi menjaga keseimbangan hubungan.

Strategi sopan-santun dapat mengarahkan pada maksimum-tuturan sebagai berikut:

1. Maksim kearifan (buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan sebesar mungkin).
2. Maksim kedermawanan (buatlah keuntungan dsiri sekecil mungkin dan buatlah kerugian diri sebesar mungkin).
3. Maksim pujian (kecamlah orang lain sedikit mungkin, pujilah orang lain sebanyak mungkin).
4. Maksim kerendahan hati (pujilah diri sendiri sedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin).
5. Maksim kesepakatan (usahakan ketidaksepakatan sedikit mungkin, usahakan kesepakatan dengan diri lain sebesar mungkin).
6. Maksim simpati (kurangi rasa antipati antara diri dengan

orang lain sekecil mungkin, tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dengan yang lain).

Mengacu pada eksistensi wacana, maka dalam memahami wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan perlu dilihat konteks yang melingkupinya. Konteks dapat dilihat dari prinsip tuturan yang dipakai sebagai strategi menghindari konflik penutur-pendengar dan nilai-nilai gender dalam komunitasnya serta konteks situasi tuturan yang berkembang.

Secara teoritis, konteks dalam komunikasi dapat dibedakan antara konteks generik dan konteks spesifik. Konteks generik bersifat umum yang keberadaannya, ciri, maupun penyikapan terhadapnya telah disadari anggota suatu masyarakat bahasa, sedangkan konteks spesifik adalah konteks yang berhubungan dengan situasi dalam peristiwa tutur (Givon dalam Aminudin, 1988:93).

2.3 Operasionalisasi Konsep

Wanita merupakan salah satu jenis kelamin yang dibedakan atas pria. Dalam penelitian ini wanita mengacu pada seseorang dalam status keluarga, baik dalam status sebagai istri atau yang berkedudukan sebagai orang tua.

Wacana merupakan tindakan sosial yang memanfaatkan aspek kebahasaan dan aspek sosial. Wacana dalam penelitian ini dapat difahami pada pemakaian bahasa sehari-hari baik dalam bahasa sebagai bentuk pernyataan secara verbal dan bahasa sebagai bentuk kode sosial yang terealisasi secara

non verbal. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada proses berbahasa yang melibatkan wanita dengan wanita/di antara wanita-wanita, wanita dengan pria di antara wanita dan pria, wanita berhadapan dengan kelompok wanita.

Interpretasi Sopan-Santun adalah cara bertutur dengan menerapkan prinsip kesopanan sebagai refleksi dari tindak kesopanan berbahasa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menyikapi aturan/norma yang mengatur tuturan demi terjaganya, etika, keramahan hubungan dan keseimbangan sosial.

Proses pengambilan keputusan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memecahkan suatu masalah, dilaksanakan dalam keadaan nyata dan dalam interaksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

1. kedudukan dan jabatan,
2. masalah yang dihadapi dan nilai-nilai sosial,
3. argumentasi yang berkembang.

BAB III

TUJUAN DAN MAFAAT PENELITIAN

2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat memperjelas bias gender dalam wacana.

Sesuai dengan permasalahannya, tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan seputar masalah publik di lingkungan komunitasnya. Tujuan ini di samping dapat menggambarkan profil wacana yang berkembang di lingkungan komunitas, juga menggambarkan wacana wanita sesuai dengan identitas dan peran gender yang berlaku di lingkungan komunitasnya.
2. Menelaah konteks yang mempengaruhi wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan ini menggambarkan pengaruh konteks sosial dan konteks situasi dalam wacana wanita pada proses pengambilan keputusan.
3. Menelaah prinsip sopan-santun sehubungan wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan.
4. Menelaah makna sopan-santun wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan analisis

fungsi bahasa. Di samping itu penelitian ini mengungkap nilai sosial budaya yang masih mempengaruhi wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan.

2.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis dan teoritis, yakni:

1. Memberikan sumbangan teoritis pada studi bahasa yang sifatnya interdisipliner, khususnya pada kajian sosio-pragmatik. Dengan temuan penelitian ini, secara teoritis juga memperjelas tesis Leech yang menyatakan bahwa prinsip sopan mempunyai peranan lebih tinggi dibanding prinsip tuturan yang lain. Prinsip sopan-santun merupakan refleksi tindak kesopanan berbahasa untuk menjaga etika, keseimbangan sosial, dan keramahan hubungan. Oleh karena itu 'sopan' dapat bersifat relatif, yakni relatif dengan norma perilaku yang dianggap khas (typikal) untuk situasi tertentu dan norma kebudayaan masyarakat yang berlaku.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah pengkajian aspek gender dalam dimensi bahasa. Sehingga lebih memperjelas bahwa bias gender, di samping terdapat dalam dimensi kerja atau pada sektor produksi, juga dapat dilihat dari dimensi bahasa. Dengan temuan penelitian ini diharapkan memberi wawasan bahwa kesetaraan gender tidak hanya terbatas pada akses kerja tetapi juga pada akses dalam proses pengambilan keputusan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Yang Dipakai

Sebagai upaya mencapai tujuan permasalahan, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif melalui pertimbangan:

1. Penelitian ini berpijak pada pemahaman simbol bahasa dalam pemakaiannya.
2. Data berupa tindak berbahasa yang diamati dari sikap ketika mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

4.2 Teknik Pencarian Data

Data dikumpulkan dari rekaman wicara dalam setting lingkungan komunitas yang tercakup dalam lingkup kehidupan warga perumahan. setting dipilih dari lingkup perumahan yang dihuni oleh mayoritas dari suku Jawa, dan wanitanya (yang sudah menikah) mayoritas bekerja.

Komunitas dimaksudkan sebagai salah satu unit terkecil dalam sistem kemasyarakatan/ sistem sosial tertentu. Mengacu pengertian ini, maka kelompok warga perumahan yang ada dalam wadah RT sudah dapat dianggap sebagai komunitas. Karena kehidupan dalam kelompok warga RT sudah mencerminkan norma dan nilai yang mengatur hubungan sosial individu yang

terlibat di dalamnya.

Data diupayakan berupa wacana dengan mengarahkan pada variabel konteks (personal, situasi, tempat, topik, bentuk amanat, kode). Maka dalam pengumpulan data di samping dengan merekam juga ditempuh cara 1) observasi, 2) wawancara, 3) catatan lapangan.

1. Observasi untuk mendapat gambaran umum kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam komunitas yang dijadikan sasaran penelitian.
2. Wawancara untuk melengkapi pengamatan lapangan dan men-jaring data implikatur percakapan dan nilai gender yang berkembang di lingkungan komunitasnya.

Teknik wawancara yang diterapkan menggunakan cara wawan-cara mendalam yang memberi keleuasaan informan untuk mengungkapkan maksud dari suatu pernyataan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan, serta pandangan me-ngenai identitas dan peran wanita.

Topik pertanyaan diarahkan pada masalah yang berkisar:

- Masalah yang pantas ditangani atau masalah yang sering mendapat perhatian wanita.
- Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan.

Pencatatan data wawancara ini bisa dilakukan dengan perekaman atau pencatatan, tergantung dari subjek yang dihadapi.

3. Catatan lapangan untuk mencatat konteks berlangsungnya

wacana proses pengambilan keputusan.

4.3 Analisis Data dan Simpulan

Data dianalisis dengan menerapkan metode deskriptif dan metode hermeneutic. Metode ini dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. tahap simbolik, yakni mendiskripsikan bentuk wacana lisan ke dalam data kebahasaan.
2. tahap maknawi, yakni menghubungkan data kebahasaan dengan konteks.
3. tahap filosofis, yakni menghubungkan interpretasi kesopanan wacana dengan norma yang berlaku.

Klasifikasi data sebagai keperluan analisis konteks wacana akan diarahkan pada konsep generik dan spesifik dari Givon (1988). Sedangkan klasifikasi data sebagai keperluan penafsiran interpretasi sopan-santun dalam wacana menggunakan konsep Leech dan Lakoff.

Mengacu pada konsep Leech, interpretasi sopan-santun dapat dilihat dari maksim kearifan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan dan maksim simpati. Lakoff mengidentifikasikan prinsip sopan santun ke dalam tiga kaidah, yakni:

1. Formalitas bersifat tidak memaksa. Kaidah ini dapat tercermin dalam pemakaian maksim kearifan, maksim kesepakatan, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati.
2. Ketaktegasan bersifat memberi kelonggaran mitra tutur me-

mentukan pilihan. Kaidah ini dapat tercermin dalam pemakaian maksim kesepakatan, maksim simpati, maksim kedermawanan.

3. Kesekawanan bersifat menganggap mitra tutur adalah sama dan tuturan dapat menyenangkannya. Kaidah ini dapat tercermin dalam pemakaian maksim simpati, maksim kerendahan hati.

Penarikan simpulan dilakukan secara interpretatif dan digeneralisasi secara induktif. Teori-teori yang ada dipakai untuk menafsirkan data yang teramati dan menjelaskan sehingga tercapai gambaran yang jelas.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil wacana wanita di lingkup komunitas

5.1.1 Komunitas Perumahan

Pencerminan sebagai komunitas, di antara warga RT saling memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan interaksi sosialnya. Hal ini ditandai kesadaran untuk memiliki sarana penunjang kegiatan sosial mereka, seperti pemilikan masjid, balai pertemuan warga/ balai RW, pos penjagaan keamanan, dan organisasi masyarakat yang berada dalam lingkup perumahan, yakni : PKK RT/RW , pengajian/perkumpulan kerokhanian, karang taruna. Kesemua ini untuk menjaga hubungan sosial di antara warga perumahan.

Berdasarkan data kewargaan dapat diketahui di lingkungan perumahan dari objek penelitian ini mayoritas dihuni oleh keluarga dari suku Jawa, yakni mencapai 50 % lebih. Hal ini seperti nampak pada perumahan Rungkut Barata (Surabaya), 59% yakni 272 kk dari 454 kk adalah suku Jawa, selebihnya dari suku Madura, Sunda, Batak, Ambon dan Menado . Wanita bekerja mencapai 51% (227 dari 447 wanita dalam status keluarga, selebihnya ibu rumah tangga). Di perumahan Griya Permata

Alam (Malang) 62% yakni 97 kk dari 154 kk adalah suku Jawa, selebihnya suku lain, dan wanita bekerja mencapai 48 % (62 dari 130 wanita dalam status keluarga). Di perumahan Griya Citra Asri (Sidoarjo), yakni 75 % dari 62 KK dari 126 kk adalah suku Jawa, dan wanita bekerja mencapai 52 % (54 dari 96 wanita dalam status keluarga).

Dalam kepengurusan RT terdapat susunan pengurus, yakni: ketua, wakil, Sekeretaris, Bendahara, dan Keamanan. Personal yang menjabat ketua RT dan wakil RT pada umumnya dijabat oleh pria.

Adapun tugas RT yang pokok adalah melayani warga dalam meminta surat keterangan dalam mengurus KTP, KSK, kematian, perkawinan. Tugas-tugas lain yang menyangkut kegiatan sosial masyarakat lazim ada dalam lingkup ke-RT-an di bawah koordinasi RW, misalnya masalah keamanan, saluran pematuan, jalan dan lain-lain. Masalah yang tercakup dalam lingkup ke-RT-an ini selalu dirapatkan dalam kepengurusan RT yang melibatkan warganya , yakni dalam rapat *rembug* kampung.

Di samping kepengurusan RT terdapat kepengurusan PKK. Kendati tidak ada di bawah naungan kepengurusan RT, namun dalam realisasi, PKK menjadi bagian dari program kerja RT. Konsekuensinya pertemuan PKK merupakan pertemuan yang dapat digunakan sebagai ajang informasi putusan-putusan yang telah diambil oleh kepengurusan RT atau pun ide dari Ibu-Ibu sebagai masukan RT dalam mengambil keputusan. Masukan-Masukan dari pertemuan PKK disampaikan lewat ketua PKK dalam

rapat "rembug" kampung. Demikian pula lewat PKK, segala tarikan iuran kampung dibebankan penarikannya bersamaan iuran arisan rutin PKK. Dalam hal ini petugas dari PKK lewat dasawisma masing-masing setiap bulan bertanggung jawab menarik iuran warga yang menjadi wilayah tanggungjawabnya.

Di dalam organisasi PKK juga dibentuk kepengurusan yang terdiri atas ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan dasawisma-dasawisma. Dalam wadah organisasi ini juga dibentuk koperasi simpan pinjam dengan Ketua RT sebagai pelindungnya. Jadi dalam pertemuan PKK, selain kegiatan arisan, juga ada kegiatan simpan pinjam PKK.

Modal koperasi simpan pinjam digalang dari dana tabungan wajib dan sukarela setiap anggota PKK. Besar tabungan wajib antara PKK RT satu dengan yang lain berbeda, berkisar 2500,- dan Rp 5000,-. Sedangkan besarnya tabungan sukarela berkisar antara Rp 1000,- sampai Rp 10.000,-.

Prosedur peminjaman menegaskan pinjaman dapat diberikan pada peminjam yang tidak mempunyai catatan hutang. Bagi peminjam yang akan meminjam uang dalam jumlah besar harus mendapat persetujuan suami. Hal ini dimaksudkan untukantisipasi bila suatu saat terjadi kesulitan menarik angsuran dari peminjam.

Aktivitas kaum muda tergabung dalam organisasi karang taruna di setiap RT. Karang Taruna ini diperlukan partisipasinya dalam kegiatan kampung, seperti kegiatan pesta menyambut ulang tahun kemerdekaan, kegiatan kerja bakti.

Di samping terdapat organisasi PKK, karang taruna, di lingkungan komunitas perumahan terdapat organisasi kemasyarakatan, yakni Pengajian/Perkumpulan kerokhanian.

5.1.2 Profil Wacana Wanita

Dari wacana yang berkembang terdapat profil yang memisahkan wacana wanita dan pria. Hal ini tercermin dari cara-cara wanita atau pria berperilaku komunikasi dengan warga di lingkungan komunitasnya.

PKK, Pengajian Wanita, perkumpulan arisan Ibu-Ibu kental dengan wacana wanita. Demikian pula berkembang di lingkungan komunitas perumahan, urusan RT adalah urusan pria. Secara tidak langsung mempengaruhi wanita pada anggapan urusan RT adalah urusan kaum pria. Bila ada undangan "rembug" warga yang terkait pada undangan RT, maka diartikan sebagai undangan yang hanya ditujukan kepada Bapak-Bapak sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, dalam "rembug" warga kebanyakan selalu dihadiri oleh pria. Kalau Ibu-Ibu hadir dalam rapat "rembug" warga, sebagai perwakilan dari PKK, seperti ketua PKK dengan satu dua dari pengurus PKK, atau sebagai wakil dari kepala keluarga, atau suaminya berhalangan hadir (dinas keluar kota). Hal yang tidak lazim bila suami menyuruh istri menghadiri rapat "rembug" warga, selagi dia ada di rumah dan akan mendapat reaksi keras dari istrinya. Demikian pula, kendati wanita dalam status tidak ada suami, namun di rumah ada saudara laki-laki atau anak

laki-laki yang sudah dewasa, maka merekalah yang hadir. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

"Ibu ya enggak usah ikut rapat, cukup diwakili Bapak-Bapak, sebagai kepala keluarga kan Bapak, ya Bapak saja yang cukup hadir, kecuali seperti Bu Ina (seorang janda)."

"Yang datang dalam temu warga biasanya bapak-bapak saja. Sepanjang pengalaman saya jadi warga sini, ya bapak-bapak yang banyak hadir."

Rapat "rembug warga" menjadi seakan-akan rapat yang diperuntukkan kepada pria selaku kepala keluarga. Dalam rapat ini biasanya dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan kampung atau berkaitan dengan fasilitas yang berguna bagi kehidupan sosial pada umumnya.

Pada dasarnya masalah yang "kampung" sering berasal dari pemikiran wanita. Kendati demikian kata akhir atau dalam proses pengambilan keputusan masih dipercayakan kepada pria. Oleh karena itu, masalah seperti siskamling dengan keputusan pemasangan portal pada gang-gang, masalah saluran pematuan, masalah perbaikan jalan, masalah pembangunan gapura, pembangunan pos kamling masih menjadi wacana pria dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam pernyataan berikut:

"Ya, sepanjang keputusan itu tidak memerlukan rembug dengan dengan orang belakang, kalau menyangkut ibu seperti masalah jaminan, urusan memberi minum dan jajan itu ibu-ibu."

"Soal masalah jalan. soal masalah got adalah masalah

bapak, ibu itu kan ibu rumah tangga, kalau masalah masakan baru ibu, apa bapak, kan ya endak."

Konstruksi sosial budaya Jawa *male chauvinism*, semakin menyebabkan nilai gender yang berlaku mengarah pada proses marginalisasi wanita. Wanita harus menghormati pria. Bentuk perilaku hormat erat berkaitan dengan sikap sungkan, malu/takut. Sosialisasi ini menyebabkan wanita berupaya mengendalikan diri sikap dan tindakannya, yang terefleksi tidak ingin mendahului keputusan pria. Seperti pernyataan:

"Apa-apa yang diputuskan dalam PKK, ya belum bisa langsung dilaksanakan. Kita mesti harus membicarakan dahulu dengan RT. Saya pribadi, kalau ada usulan atau ide, saya bicarakan dulu dengan Bapaknya."

Pada kegiatan kampung yang melibatkan peran PKK, wanita selalu diberi peran konsumsi, penanaman toga (apotik hidup), menarik iuran kampung. Seperti dalam penuturan berikut:

"Konsumsi bagiannya ibu, itu sudah kodrat ibu, itu naluri bahwa ibu-ibu yang memasak, urusan perut pokoknya."

Wanita kurang berperan sebagai pengambil keputusan pada kegiatan "kampung" yang membutuhkan partisipasi PKK, seperti kegiatan menyambut hari kemerdekaan, wanita enggan menjadi ketua panitia. Yang diajukan ketua selalu pria, bahkan dari ketua PKK pun tak pernah ada pemikiran menunjuk anggotanya sebagai ketua panitia.

Dari wacana yang berkembang dapat dikatakan wanita masih merupakan objek dari suatu keputusan. Hal ini terungkap dalam pernyataan berikut:

"Kita kan tinggal menyetujui hasil putusan yang disampaikan bapak."

Mengacu temuan di atas dapat dikatakan dalam lingkup komunitas yang mayoritas dihuni oleh suku Jawa, wanita masih ada dalam kerangka wacana domestik, tergantung dan kurang berperan sebagai pengambil keputusan. Kendati telah banyak warga wanita yang bekerja atau masuk dalam kegiatan publik.

5.2 Konteks Yang Mempengaruhi Wacana Wanita

Seperti diutarakan di muka, konteks mencakup konteks sosial dan konteks situasi. Oleh karena itu pada pembahasan ini akan dikemukakan konteks sosial dan konteks situasi yang mempengaruhi wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan berikut ini.

5.2.1 Konteks Sosial

Merujuk realias sosial yang ada dalam lingkup komunitas perumahan masih nampak adanya bias gender yang mengarah pada subordinasi wanita. Hal ini cukup nampak dalam proses pengambilan keputusan.

Bias gender sebagai hasil konstruksi sosial menyebabkan wanita tidak hanya berbeda secara biologis, tetapi justru mengarah pada peran sosial dan stereotip. Dalam hubungan kuasa akan mengarah pada penempatan wanita dalam posisi

tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Hal ini cukup kentara dalam masyarakat budaya *male chauvinism*, seperti dalam masyarakat Jawa.

Mengacu profil wacana wanita yang berkembang di lingkup komunitas, konstruksi sosial budaya tersebut merupakan hal yang cukup berdampak bagi keberadaan wanita. Posisi wanita selalu dalam kuasa dan kontrol pria. Dalam dimensi ini wanita selalu bersikap dan berperilaku sebagaimana nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Salah satunya terefleksi pada wacana mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sikap ragu-ragu, takut salah, tidak berani mengambil resiko, pasif, tergantung merupakan kendala yang cukup mempengaruhi akses mereka.

Sikap tersebut di atas menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakatnya dan proses sosialisasi yang diterima wanita cukup berperan membentuk interpretasi sopan-santun wacana mereka. Seperti dijelaskan di muka melalui tesis dasar yang diusulkan Brown & Levinson diketahui bahwa penutur menghitung derajat kesopanan tindak tuturnya dengan mempertimbangkan (1) jarak sosial diantara mitra-tutur, (2) besarnya perbedaan kekuasaan atau dominasi di antara mitra-tutur, (3) status relatif jenis tindak ujaran di dalam kebudayaan.

Mengacu tesis dasar tersebut dapat dijelaskan mengapa dalam proses pengambilan keputusan dalam pertemuan *rembug* warga, wanita cenderung pasif, dengan kata lain wanita

kurang mengembangkan wacana mereka kecuali sikap 'diam' dan 'setuju', seperti tercermin dalam perakapan pada konteks berikut:

Setting : Pertemuan warga di balai RT, dihadiri 27 pria dan 6 wanita.

Topik : Pembangunan pos satpam

Ketua RT : Bagaimana, apa ada usul lain?
mungkin bu Sarif, ada usul bu?

Ibu S : ndak Pak!

Ketua RT : Mungkin dari yang lain!

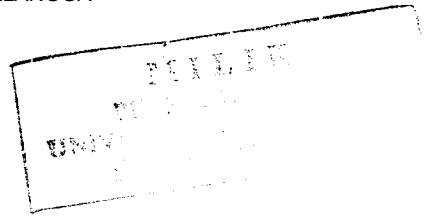
Bapak R : Apakah tidak perlu dipertimbangkan lagi ?, tapi kalau itu memang yang terbaik ya, nggak apa-apa !

Ibu-Ibu : diam , 'opo jare' (setuju/ikut saja).

Kendati pertemuan warga cukup penting dalam proses pengambilan keputusan, wanita cenderung enggan hadir. Hal ini tercermin dalam pernyataan berikut:

"Ibu enggak usah ikut rapat, cukup diwakili Bapak-Bapak. Sebagai kepala keluarga kan Bapak, ya Bapak saja yang cukup hadir, kecuali pengurus PKK atau seperti bu Ina itu (janda)."

Dari data percakapan tersebut nampak berbagai kendala masih dihadapi oleh wanita dalam proses pengambilan keputusan. Ideologi gender yang terkonstruksi dalam lingkungannya menyebabkan wanita selalu dikaitkan dengan perannya sebagai ibu dan pendam-ping suami. Sementara itu status berdasarkan peran domestik yang disandang wanita kurang memiliki wewenang di ranah publik. Kesadaran ini juga mempengaruhi tindak tutur wanita. Sikap diam merupakan refleksi dari rasa 'sungkan' sebagai bentuk dari pengendalian diri dan perilaku 'hormat', atau mengacu pada status relatif tindak ujar yang berlaku dalam konteks budaya Jawa yang bersifat 'male chau-



vinism'.

Mengamati wewenang wanita dalam proses pengambilan keputusan nampak adanya ketimpangan gender. Dalam setiap proses pengambilan keputusan nampak tiadanya akses wanita. Hal ini disebabkan, secara struktur-kultural telah diatur bahwa keputusan ada ditangan kepala keluarga.

Anggapan di atas menyebabkan wanita enggan untuk hadir dalam pertemuan warga bahkan ada perasaan sungkan. Oleh karena itu, setiap diadakan pertemuan warga guna membahas permasalahan yang ada dalam lingkup sosial selalu didominasi kehadiran pria. Bila wanita hadir dalam pertemuan tersebut biasanya dalam kapasitas mewakili organisasi kewanitaan (PKK) atau mewakili kepala keluarga (suami berhalangan hadir atau sebagai janda) dan ini pun jarang terjadi.

Dalam proses pengambilan keputusan pada rapat warga nampak peran wanita hanya dalam kapasitas partisipasi atau melengkapi forum tersebut. Mereka cenderung diam atau pasif. Bila diminta pendapat tentang setuju dan tidaknya keputusan yang akan diambil, mereka cenderung melontarkan pernyataan "setuju" tanpa ada pendapat yang lain. Karena pada umumnya mereka merasa sungkan atau takut kalau pendapatnya justru dianggap menghambat. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

"Gimana, ya daripada dilecehkan mendingan setuju saja, wong yang lain setuju, ngikut ajalah, nanti dikira macem-macem, menghambat, kan nggak enak."

Kenyataan tersebut sejalan dengan pendapat Bouvier

dalam Tommy F. Awuy (195) menegaskan wanita kehilangan "Aku"-nya melalui perasaan canggung dan merasa tidak enak bukan karena kodratnya, tetapi disubordinasikan oleh "Aku" pria. Di samping itu mereka menganggap bahwa pria (bapak) sebagai peserta dominan dalam forum rapat ini lebih tahu permasalahannya daripada wanita.

Keluhan atau permasalahan yang banyak datang dari wanita merupakan bahan masukan rapat yang dianggap sudah dibicarakan sebelumnya (antara suami dan istri) yang selanjutnya tidak perlu pendapat dari istri lagi. Hal ini tercermin dari pernyataan:

Masalah kampung biasanya saya utarakan pada bapaknya. Biar nanti disampaikan dalam acara pertemuan warga atau waktu bapak-bapak saling bertemu.

Wanita cenderung kurang responsif dalam proses pengambilan keputusan terhadap masalah yang berkembang di lingkungan masyarakatnya, seperti pemilihan RT/RW, perbaikan jalan, pembangunan kampung. Mereka memilih diam dan menganggap sebagai cara yang terbaik. Karena mereka merasa permasalahan itu wewenang pria. Keterlibatan mereka dalam permasalahan yang menyangkut kepentingan dirinya cukup disampaikan dalam bentuk keluhan *uneg-uneg* di antara sesama wanita sewaktu *ngrumpi*. Hal ini tercermin dari percakapan berikut:

Setting : Obrolan di antara ibu-ibu, berkumpul lima ibu
bertempat di rumah ibu A.

Topik : Pembicaraan masalah penanganan jalan kampung rusak
Ibu B: Gimana bu, sudah dihubungi Pak Nyoman ?
Ibu A: Sudah, malah pernah saya ngomong "Age Pak, cepet,

sampeyan aja yang ngoordinir", malah jawabnya, "Jangan saya to bu, Pak Bambang saja, yang nggak begitu repot."

Ibu H: Lha iya, ibu-ibunya sudah usul, tapi cik angele wong-wong iku.

Ibu R: Ya, maklum Bu, Bapak-bapak itu repot, sudah capek.

Ibu S: Coba, nanti saya tak omong-omong sama Bapaknya, mungkin mau nangani. Tapi mbok sudah bu A saja !

Ibu A: Aduh, ya nggak berani to Bu, resiko.

Ibu S: Iya, soalnya warga sini ini kan nggak sama, nanti dikira gimana gitu.

Ibu A: Saya sudah ngomong sama Pak Nyoman, saya yang bantu nariki tiap bulan cicilannya, tapi ndak mau.

Ibu H : Ah, kok repot-repot, ya sudah, habis gimana wong diajak nggak mau.

Dari dialog percakapan tersebut juga nampak bahwa anggapan mereka dengan terlalu ikut mencampuri permasalahan yang bukan wewenangnya justru akan mendatangkan celaan atau dicap ingin menonjolkan diri. Hal ini merupakan kendala bagi wanita sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Meski wanita cukup peka dalam menyikapi masalah publik (materi putusan tak jarang datang dari wanita), namun karena faktor kesadaran sebagai wanita dan keterbatasan wewenang karena konstruksi sosial yang berlaku, mereka hanya sampai dalam proses awal melontarkan ide. Sedangkan proses akhirnya tetap tergantung pria.

Kesadaran wanita akan dirinya membuat mereka semakin merasa bahwa dirinya tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Meskipun mereka dihadapkan permasalahan sosial yang berdampak besar pada dirinya, mereka tidak berani mengambil keputusan, tetapi cenderung menghadapkan permasalahan itu kepada pria. Hal ini tercermin dalam pern-

yataan berikut:

Kita kan tinggal menyetujui hasil putusan yang disampaikan bapak, ibu kan tugasnya tinggal membagi anggaran pengeluaran. Walau kita bekerja juga, kita harus bisa membedakan dimana kita berpijak. Kita harus menempatkan bapak sebagai kepala rumah tangga dan pengambil keputusan. Kalau ke rumah ya 'mbabu' maneh.

Mengacu bagaimana wanita menyampaikan pendapatnya lewat suami, dapat dikatakan dalam proses pengambilan keputusan, wanita lebih mengembangkan wacana ketaklangsungan, sebagai refleksi dari bentuk penghormatan.

Kenyataan-kenyataan inilah yang sebenarnya cukup berperan pada suburnya ketimpangan gender di lingkungan masyarakat dan hegemoni atas diri wanita.

Mengacu pendapat Gramsci bahwa hegemoni merupakan bentuk kekuasaan yang mempengaruhi aspek psikologis yang bersifat tersembunyi, sehingga pihak yang dikuasai tidak merasakan dan menerimanya secara wajar (Kris Budiman, 1992). Merujuk pada kesenangan wanita menyerahkan permasalahan publik pada pria menunjukkan bahwa mereka secara tidak langsung melegitimasi ranah publik bukan ranah wewenangnya menunjukkan bahwa telah terjadi *hegemoni*. Hal ini yang menjadikan adanya paradoks dalam diri wanita. Wanita berada dalam persimpangan antara peran publik dan domestik.

Paradoks terjadi pada diri wanita karena peluang publik yang telah terbuka baginya belum sepenuhnya mereka dapat berakses di dalamnya. Karena ketimpangan gender wanita menjadi tersuborsinasi dalam status kuasa di bawah superior-

dinasi pria.

Wanita sering merasa selaku istri dan ibu rumah tangga harus menyadari posisinya sebagai pendamping dan bertanggung jawab pada kehidupan keluarga. Dalam posisinya itu, mereka menganggap bahwa pengambil keputusan tetap ada ditangan suami dan segala urusan yang ada di luar tanggung jawab keluarga adalah urusan suami. Sebagai pendamping mereka hanya berhak memberi masukan sebatas ide, boleh diterima atau ditolak. Mereka tidak merasa sakit hati bila ide mereka tidak dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Bila dilihat dari skala Leech, wanita lebih menginterpretasikan bentuk sopan-santun mereka dalam proses pengambilan keputusan pada skala untung-rugi, yakni dengan memberi keuntungan pada mitra-tuturnya.

Mereka juga berpikiran sepanjang keputusan itu dianggap baik oleh pria, maka keputusan itu juga baik baginya.

Gambaran ini terungkap dalam tuturan berikut:

Bila Bapak sudah menerima keputusan hasil rapat, tentunya keputusan itu baik. Sepanjang keputusan itu bermanfaat bagi semua warga, apa salahnya. Yang penting dana yang dibutuhkan masih dapat dijangkau.

Wanita sering merasa bahwa dirinya harus pandai berolah sikap, yakni bisa menempatkan diri dalam posisinya sebagai pendamping. Kendati mereka sebagai wanita bekerja, tetap tidak boleh merasa di atas pria. Di lingkungan komunitasnya, mereka harus bisa membawa diri agar tidak berkesan mendominasi pria. Karier yang mereka capai siap mereka tanggalkan bila kembali di lingkungannya. Mereka tetap dalam po-

sisi pendamping dan penerima putusan. Seperti tergambar dalam tuturan berikut:

Kita harus bisa membedakan dimana kita berpijak. Kita di rumah, ya menjadi ibu rumah tangga, bukan pegawai lagi. Kita harus tetap menempatkan bapak sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan.

Mengacu tahap bagaimana wanita terlibat dalam proses pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai berikut:

Materi Putusan

Wanita	Pria	Keputusan
--------	------	-----------

Seperti dijelaskan di muka, budaya 'male chauvinism' cukup kentara dalam kehidupan masyarakat Jawa. Budaya 'male chauvinism' pada dasarnya mengarah pada bias gender yang cukup berpengaruh pada kesadaran seseorang akan 'identitas gender' dan 'peran gender'. Mengacu pada pengertiannya identitas gender mengacu pada persepsi dan pribadi seseorang tentang eksistensinya, sedangkan peran gender adalah ekspresi individual dari sifat eksistensinya dalam setting sosial (Budi Gunawan, 1992:31). Dalam dimensi ini wanita akan selalu bersikap sebagaimana norma dan stereotipikal yang berlaku dalam masyarakatnya.

Stereotipikal dan norma yang bersumber pada ideologi gender sangat mempengaruhi wanita dalam proses pengambilan keputusan. Nilai 'kepantasan' dan norma yang mengatur wewenang wanita ada di ranah domestik menyebabkan kurang memili-

ki akses dalam pengambilan keputusan masalah publik. Konsekuensi logisnya wanita selalu menyerahkan keputusan ditangan pria.

5.2.2 Konteks Situasi

Ketergantungan wanita pada pria dalam proses pengambilan keputusan cukup kentara bila:

1. berhadapan dengan mitratatur pria
2. pada situasi resmi (rapat warga, rapat PKK)
3. perbincangan pada masalah publik di antaranya menyangkut masalah:
 - pembangunan fasilitas kampung (perbaikan jalan, pembangunan pos satpam, balai RW/RT, gapura kampung, saluran pematuan, pemasangan portal di mulut gang sebagai pengamanan kampung).
 - politik (pemilihan ketua RT/RW dan pengurus kampung)
 - ekonomi yakni menyangkut finansial besar (pendanaan besar), seperti peminjaman koperasi lebih dari satu juta rupiah, kredit barang yang harganya lebih dari satu juta rupiah)

Pada situasi berhadapan dengan mitratatur pria dalam rapat rembug warga, wanita cenderung pasif atau diam dalam proses pengambilan keputusan. Dampak dari sikap ini, wanita selalu menerima hasil keputusan.

Sikap pasif dan cenderung menyerahkan keputusan pada pria juga nampak bila wanita terlibat dalam perbincangan

masalah publik. Hal ini tak lepas dari anggapan bahwa masalah publik seperti masalah jalan, got, masalah yang berhubungan dengan pembangunan adalah masalah pria (bapak). Demikian halnya masalah rembug warga adalah masalah pria. Oleh karena itu yang wajib hadir adalah pria. Wanita diperlukan hadir sejauh senbagai wakil dari PKK atau bapak berhalangan hadir.

Pada situasi berhadapan dengan masalah yang menyangkut finansial besar, wanita kurang berani mengambil keputusan. Pertimbangan keputusan ada di tangan pria juga dilandasi adanya anggapan pria sebagai sumber nafkah. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyangkut pendanaan besar, wanita tidak boleh mendahului keputusan pria.

5.3 Prinsip sopan-santun

Ketergantungan wanita dalam proses pengambilan keputusan ini cukup mempengaruhi bentuk interpretasi sopan-santun wacana mereka. Dalam konteks, berhadapan dengan mitratatur pria, dalam topik pembahasan masalah publik, pada situasi resmi maupun tidak resmi, wanita cenderung mengembangkan wacana sopan-santun mereka dengan menekankan pada :

(1) Maksim kedermawanan yang bersifat ketaktegasan, yakni mengisyaratkan wanita dengan suka rela dalam posisi membantu kepentingan/kebijaksanaan/wewenang pria atau lebih memberikan kelonggaran pada pria untuk menentukan putusan, seperti

dalam pernyataan "...nanti tak bantu nariki danae" (saya nanti yang membantu menariki dananya); "ndak Pak "(tidak ada usul). Refleksi wanita dalam tindak kesopanan dengan menekankan maksim kedermawanan cenderung mengarah adanya hebemoni patriarki.

(2) Maksim kerendahan hati yang bersifat ketidaktegasan, yakni mengisyaratkan dalam posisi ketergantungannya pada pria, wanita secara tidak langsung lebih percaya kepada pria dalam memutuskan segala sesuatu yang menyangkut permasalahan publik. Dengan kata lain terjadi hegemoni patriarki.

(3) Maksim kesepakatan yang bersifat ketaktegasan, yakni mengisyaratkan dalam posisinya ketergantungannya, wanita harus selalu hormat pada pria dengan mendahulukan pendapat pria, menyepakati putusan yang diambil dan tidak memaksakan kehendaknya. Wanita harus mengedepankan perasaan sungkan. Dengan kata lain telah terjadi ketimpangan gender yang mensubordinasikan posisi wanita.

Peran domestik pada wanita berpengaruh wanita di bawah status pria. Hal ini seperti ditegaskan dalam pendapat bahwa sistem budaya male chovinism memberikan wibawa dan nilai lebih untuk peran publik dan kegiatan pria daripada dilakukan wanita di sektor domestik (Rosaldo, 1983:19).

Kenyataan ini tercermin dalam prosedur peminjaman koperasi PKK. Bagi yang meminjam lebih dari lima ratus ribu rupiah harus melalui pernyataan persetujuan suami. Pertimbangan ini didasarkan pada anggapan bahwa yang berpenghasi-

lan utama adalah bapak/suami, seperti terungkap dalam pernyataan berikut:

"Iya, nanti nek ibune tok piye, wong yang cari duwek bapak. Bapak ndak mau tau ya repot, lha nak bapak wis ruh, nak wis tanda tangan, tinggal kalau ada apa-apa, ini lho istrimu pinjam."

Maksud pernyataan tersebut, pinjaman dalam jumlah besar harus persetujuan suami. Dikhawatirkan bila ibu tidak bisa membayar dengan sepengetahuan suami akan dapat terselesaikan. Kenyataan tersebut menunjukkan wanita masih menggantungkan keputusan pria.

Mengamati wacana di atas dapat dikatakan wanita masih mengembangkan wacana sopan-santun dalam proses pengambilan keputusan dengan menekankan maksim kerendahan hati yang bersifat ketaktegasan yakni mengisyaratkan wanita dalam posisi ketergantungan karena status kuasa yang dimilikinya tidak memiliki wewenang memutuskan hal yang bersangkutan dengan ranah produksi yang menyangkut masalah finansial. Kesadaran wanita yang menganggap status kuasa terbatas dalam finansial kecil ini juga terungkap dalam proses membeli barang-barang yang membutuhkan dana besar harus persetujuan suami.

Demikian pula dalam keorganisasian, wanita cenderung hanya ingin jadi anggota, kurang renponsif, posisi sebagai pengambil keputusan kurang diminati. Hal ini tercermin dalam percakapan berikut :

Setting : pertemuan dihadiri kepengurusan lama dan sebagian anggota organisasi pengajian wanita sebanyak

20 orang.

Topik : pertemuan untuk pemilihan kepengurusan baru organisasi pengajian.

Situasi pembicaraan resmi.

Ketua : - Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
- ucapan terima kasih pada hadirin
- Sesuai undangan rapat hari ini adalah pemilihan ketua baru dan pengurusnya. Rapat yang lalu, mungkin banyak yang tidak hadir. Yang hadir hanya 8 orang, kalau nggak salah waktu itu ditempatnya ibu Holly, itu sudah kita sepakati bahwa ketua tidak langsung berlanjut dua periode. Yang sekarang pilihan kembali supaya fair.

Ibu T : Supaya tidak ada ngedumel di belakang

Ketua : di sini caranya bu nanti akan kami edarkan kertas

ibu-ibu tulis, bursa yang sudah disepakati yang pertama ibu Bandiri, yang kedua ibu Warsita, yang ketiga ibu Yeni, yang keempat ibu Nuraini.

Ibu M : Mbok ibu Bandiri lagi saja lah, yang dicalonkan disitu apa pasti mau, karena ibu Nuraini pesan, kalau beliau tidak bisa hadir dan tidak mau dicalonkan.

Ketua : Ya ndaak to bu, O ya jadi yang dicalonkan tinggal 3

karena bu Nuraini tidak hadir dan tidak bersedia.

Ibu M : sama bu Ninik, gantinya.

Ibu Ninik : Iki provokator lak an.

Ketua : Karena kemarin sudah diputuskan, sesuai dengan keputusan apabila ibu tidak hadir, maka ya menerima keputusan.

(Proses pemilihan ketua berlangsung terpilih ketua lama
terpilih kembali, kemudian dilanjutkan pemilihan pengurus)

Ketua : sekretarisnya siapa, bu Ninik ya

Ibu Ninik : Jangan saya to bu, bu Warsita saja.

Ibu-Ibu : setuju, bu Ninik.

Mengamati dialog percakapan tersebut nampak adanya

keengganan atau sikap malu-malu dari wanita untuk menempati posisi sebagai pengambil keputusan. Mereka cenderung kurang percaya diri bahkan ada anggapan bila langsung menerima posisi yang ditawarkan akan dicap ingin menonjolkan diri. Sikap awal penolakannya boleh dikata sebagai upaya untuk meredam suara-suara yang tidak diinginkan sekaligus sebagai penjajagan dukungan terhadapnya.

Pada proses pengambilan keputusan untuk menempatkan wanita dalam posisi jabatan ketua dapat dianalisis wacana sopan-santun yang berkembang. Sikap malu-malu, kurang percaya diri, takut di cap ambisi mempengaruhi wanita cenderung menginterpretasi sopan-santun wacananya dengan menekankan pada :

- (1) Maksim kerendahan hati dengan sifat ketidaktegasan, yakni mengisyaratkan pada sikap yang menunjukkan bahwa dirinya kurang tepat dalam posisi yang memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan, yang memungkinkan dialihkan pada yang lain.
- (2) Maksim simpati dengan sifat ketaktegasan, yakni mengisyaratkan pada sikap yang menunjukkan tidak ingin dikatakan ambisi dalam menempati posisi pengambil keputusan, dan memandang kemampuannya sama dengan yang lainnya. Sehingga ada kemungkinan untuk dipilih yang lain.

Sikap malu-malu, kurang percaya diri dalam menduduki posisi sebagai pengambil keputusan menunjukkan adanya posisi subordinat dalam diri wanita, karena adanya ketimpangan

gender. Sehingga mereka merasa kurang pantas menduduki pimpinan atau sebagai pengambil keputusan.

Pertemuan-pertemuan wanita tak lebih hanya sebagai sarana berkumpul wanita dan membicarakan masalah yang berkaitan dengan urusan domestik mereka. Peran resmi wanita yang tersalur dalam PKK juga tak lebih hanya melaksanakan program kerja RT. Hal ini nampak pada aktivitas kerja PKK bahwa lewat dasawisma-dasawisma di samping menarik iuran arisan PKK juga diberi beban menarik iuran warga RT dan menginformasikan keputusan dan himbauan dari RT. Kewajiban ini dilaksanakan karena anggapan bahwa pria sudah sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Pada pertemuan arisan ibu-ibu atau arisan PKK, praktis tidak pernah dilakukan proses pengambilan keputusan yang sifat keputusannya langsung dapat dilaksanakan. Masalah yang diperbincangkan atau diputuskan di kalangan wanita dibicarakan dulu dengan RT atau dianggap sebagai materi masukan dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat "rembug" warga.

Bila tidak ada acara ketrampilan atau promosi, praktis dalam pertemuan PKK hanya mendengarkan laporan-laporan dari seksi pengurus dan pengumuman-pengumuman. Dilanjutkan arisan dan lotre, serta simpan pinjam. Sepinya tanggapan atau usulan karena adanya anggapan bahwa pertanyaan atau usulan hanya akan mendatangkan perasaan tidak enak, seolah-olah

tidak mempercayai pada seksi pengurus yang bersangkutan. Hal ini tercermin dari pernyataan :

"Ah nggak enak kalau banyak bertanya atau usul, dikira gimana gitu, seolah-olah kok nggak percaya, salah-salah nanti jadi yang disuruh."

Kendala yang sering dihadapi wanita, di samping terbentur pada norma bahwa pengambilan keputusan harus melalui rapat "rembug" warga, mereka merasa tidak mampu menangani masalah di luar urusan domestiknya. Sehingga dalam pertemuan PKK, wanita kurang responsif dan cenderung menyepakati laporan-laporan dari seksi pengurus. Bila tidak setuju pun mereka enggan bertanya atau usul. Sikap-sikap ini terefleksi dalam sikap diam.

Mengacu pada keadaan yang terjadi dalam pertemuan PKK tersebut dapat diamati interpretasi sopan-santun dalam proses pengambilan keputusan, wacana wanita lebih menekankan pada:

- (1) Maksim kesepakatan dengan sifat ketaktegasan, mengisyaratkan pada sikap wanita yang cenderung menyetujui sebagai bentuk perilaku 'hormat' dan dengan tidak mengajukan pertanyaan atau usulan akan membuat pengurus lebih leluasa menjalankan program kerjanya.
- (2) Maksim simpati dengan sifat ketaktegasan, yakni mengisyaratkan pada sikap wanita yang takut bila dianggap ingin menonjolkan diri atau dikatakan terlalu mencampuri urusan orang lain. Sikap mendukung atau tidak mempermasalahakan laporan juga sebagai upaya membuat perasaan

senang.

Masyarakat Jawa menganggap pimpinan merupakan posisi terhormat karena posisi pengambil keputusan adalah panutan. Dalam masyarakat Jawa terdapat semacam norma yang mengatur wanita harus berperilaku baik, sopan, dan berlaku hormat sebagai pencerminan dari sikap pengendalian diri. Refleksi dari sikap ini diwakili oleh tiga istilah 'wedi' (takut), 'isin' (malu), dan 'sungkan' (tahu diri). Oleh karena itu wanita dituntut harus pandai berolah sikap agar tidak mendapatkan celaan. Norma-norma tersebut tercermin dalam percakapan berikut:

Setting : pertemuan PKK dihadiri para anggota (wanita) dan ketua RT

Topik : pertemuan rutin dan membahas seputar kegiatan memperingati hari kemerdekaan RI

Seksi-seksi: membacakan laporan

Anggota : diam (tidak ada tanggapan dan usulan)

Ketua PKK : Yang perlu saya sampaikan juga ibu-ibu sekalian, diharapkan siapa pun nanti sebagai wakil RT 08, diharapkan tampil dalam lomba yang diadakan oleh panitia kelurahan. Itulah ibu-ibu yang perlu saya sampaikan, sebelum pengarahan dari bapak RT, bagaimana kalau langsung kita tunjuk satu-satu. Selatan sudah diwakili bu Imam ya, kemudian siapa yang kita tampilkan dalam balap karung, nyunggi tempeh. Mestinya biar merata. Bu Sumaji atau mbak Dar lomba balap karung. Bu Sumaji nggih, taksih timur, nggih bu Sumaji!

Bu Sumaji : ampun to, ampun kulo.

Ketua PKK : mboten nopo-nopo, mangke kula nggih nenggani, dos pundi bu Sumaji?

Bu Sumaji : diam (tanda setuju)

Ketua PKK : Lomba nomor tiga, ngempit balon, bu Astamun, ya bu Astamun?

Bu Astamun : coba ditawarkan yang lain dulu to.

Mengamati percakapan di atas nampak posisi ketua berperan menentukan putusan. Sebagai refleksi dari perilaku sopan dan hormat nampak ibu yang mendapat kepercayaan mewakili kelompok tidak serta merta menerimanya, kendati pada akhirnya setuju. Sebab segera menerima tawaran dapat dianggap berambisi atau istilah Jawa 'golek alem'.

Sikap penolakan pada awal tawaran merupakan refleksi dari wacana sikap sopan-santun. Mengacu sikap-sikap tersebut dapat dikemukakan interpretasi sopan-santun wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Maksim kerendahan hati dengan sifat ketaktegasan, yakni mengisyaratkan sikap wanita tidak serta merta menerima tawaran agar tidak dianggap terlalu percaya diri/memuji diri sendiri atau tidak memaksakan diri untuk tampil.
2. Maksim kesepakatan dengan sifat ketaktegasan, yakni mengisyaratkan sikap wanita dalam perilaku hormat, yakni menyetujui putusan ketua. Sikap ini juga sebagai cermin bahwa wanita tidak pantas menolak keputusan dari pimpinan. Karena pimpinan merupakan panutan.

Mengamati refleksi tindak kesopanan di atas, jelas pengembangan wacana sopan-santun wanita identik dengan perilaku hormat. Namun perilaku hormat ini tak lepas dari norma kepantasan komunitasnya yang mengarah pada bentuk ketimpangan gender dan hegemoni patriarki

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Keberadaan wanita di lingkungan komunitas masih menempati posisi kedua. Hal ini tercermin dari jaranganya wanita menempati posisi sebagai pengambil keputusan.

Penerapan budaya male chauvinism dalam masyarakat Jawa menyebabkan wanita terkonstruksi pada peran domestik, sehingga kurang berperan aktif bahkan cenderung pasif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah publik. Wanita terbatas pada peran domestik yang dekat dengan peran sebagai ibu rumah tangga dan pendamping suami. Dalam peran ini wanita tidak berhak atas pengambilan keputusan. Mereka bisa dimintai pertimbangan atas keputusan yang diambil, namun bila keputusan dirasa tidak memerlukan pertimbangannya, maka keputusan diambil tanpa melibatkannya.

Konstruksi sosial berpengaruh terhadap tersubordinasinya peran wanita dalam proses pengambilan keputusan. Kecilnya akses mereka menunjukkan adanya ketimpangan gender dan hegemoni patriarki. Wanita banyak mengalami kendala dalam proses pengambilan keputusan karena anggapan bahwa status kuasa wanita lebih rendah dari pria.

Konstruksi sosial terhadap wanita berkorelasi langsung

terhadap konteks yang mempengaruhi wacana wanita dalam proses pengambilan keputusan.

Dilihat dari eksistensi wacana, baik dalam tindak verbal dan non-verbal, wanita lebih mengutamakan wacana yang bersifat performatif ekspresif. Tercermin pada penekanan prinsip kesopanan dengan penerapan maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan dan maksim simpati. Sedangkan dalam tindak non verbalnya, wanita cenderung diam, tersenyum, dan menganggukkan kepala.

Kesadaran peran gender dalam wacana proses pengambilan keputusan tercermin dari cara wanita merefleksikan bentuk sopan-santun pada ketaktegasan yang memberikan kelonggaran pada pria untuk memutuskan, karena anggapan status kuasa yang dimilikinya lebih rendah dibandingkan pria.

Kesadaran identitas gender, tercermin dari cara wanita merefleksikan bentuk sopan-santun dengan menekankan pada maksim kedermawanan, kerendahan hati, dan maksim kesepakatan sebagai bentuk perilaku hormat yang dekat dengan sifat wedi 'takut', isin 'malu', dan sungkan 'tahu diri'.

6.2 Saran

Penulis sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna namun percaya lewat kajian ini dapat digali lebih lanjut permasalahan wacana yang berkaitan dengan bias gender.

Mengacu dari hasil temuan dalam kajian ini dapat dikemukakan bahwa bias jender tidak hanya menyangkut praksis

kerja yang berkaitan dengan sistem produksi, tetapi juga menyangkut praksis komunikasi yang berkaitan dengan tindak tutur dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa kesetaraan gender tidak cukup dalam menyetarakan posisi di sektor kerja, pendidikan, dan kerorganisasian, tetapi juga menyetarakan di dalam tindak wacana mereka. Karena pada dasarnya penguasaan teknis tidak cukup berarti sepanjang penguasaan tindak komunikasi tidak teratasi.

Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan gender dan hegemoni patriarki yang mendominasi wanita masih diperlukan sikap yang tidak saja bersifat antisipatif, tetapi juga harus proaktif dalam wacana mereka. Wanita harus mampu dan berani menyalurkan akses mereka dalam permasalahan publik. Sebab secara formal hal tersebut merupakan akses yang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.

Tindak kesopanan tetap harus dijaga demi menjaga hubungan. Prinsip kesopanan dalam proses pengambilan keputusan bukan berarti menyerahkan sepenuhnya pada putusan pria, tetapi harus dalam artian toleransi pada pendapat lain dan tidak memaksakan kehendak.

Kajian ini perlu ditindaklanjuti, dengan menggabungkan studi bahasa dan analisis sosial, pembahasan gender diharapkan dapat menemukan hasil yang semakin bermakna bagi perbaikan nasib wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar. 1985. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Awuy, Tommy F. 1995. *Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Jentera.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Sexual*. rev. ed. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Kris. 1991. "Bahasa dan Diskriminasi Seksual", *Basis*, no. 12.
- Fakih, Mansoer. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press.
- Gradoll, David & Joan Swamm. 1989. *Gender Voices*. Basil Blackwell Ltd. Chamridge.
- Handayani, Trisakti. 1994, "Wanita: Antara Kaier Politik dan Budaya Politik di Indonesia", *Bestari: Issue-Issue Trend Seputar Wanita*. No. 16, Th. IV, Januari- Maret.
- Hariadi, Sri Sanituti. 1991, "Posisi Wanita Dalam Masyarakat", Makalah Seminar Sehari, Surabaya, 22 Desember 1991.
- Karl, Marilee. 1995. *Women and Empowerment: Participation and Decision Making*. Zed Books Ltd. London & New Jersey.
- Murniati, A.P. 1992, "Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan", *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Noerhadi, Toety Heraty. 1989, "Dalam Bahasa, Wanita pun Tersudut," *Prisma*. Jakarta No. 1 Tahun XVIII.

- Oetomo, Dede. 1995, "Idiologi Jender di Indonesia", *Media Studi Wanita: Sarana Komunikasi dan Informasi Tentang Jender dalam Pembangunan*. Pusat Penelitian/ Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Vol.3, No.2.
- Prawitasari, J.E. 1993, "Gender dan Komunikasi Non-Verbal", dalam Laporan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Rozaldo, Michalle Z. 1983. *Women, Culture and Society*. California: Stanford University Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1984, "Citra Diri dan Peran Ganda Wanita Dalam Masyarakat Sebagaimana Dicitakan Kartini". Makalah pada sarasehan "Citra Wanita Masa Kini", oleh Yayasan Perguruan Cikini, Jakarta.
- Schrijvers, Joke. 1986, *Mother For Life : Motherhood and Marginalization in The North Central Province of Sri Lanka*. Eburon, Delft.
- S.J. Budi Susanto. 1992, "Kekuasaan (Pria) dan Siasat Keperempuanan", *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Cet.I, Yogyakarta: Kanisius.
- Spender, Dale. *Man Made Language*. London, Boston, Routledge & Kegan Paul.
- Sulistyo, Djoko. 1995, "Studi Perbandingan Profil Budaya Politik Wanita di Pedesaan dan Perkotaan serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik", *Media Studi Wanita : Sarana Komunikasi dan Informasi Tentang Jender dalam Pembangunan*. Lemlit/SKW Universitas Airlangga. Vol.3, No.2, Agustus .
- Suryakusuma, Julia I. 1991, "Konstruksi Sosial Seksualitas: Sebuah Pe-ngantar Teoritis", *Prisma*. No.7, Tahun XX.
- Tarigan, Henry Guntur. 1987. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.

Thorne, B.,C. Kramarae, and N.Henley. 1983. *Language, Gender and Society*. Rowley, Mass, Newbury House.

Tim Peneliti FISIP UI. 1980. *Wanita sebagai Penghasil Pendapatan*. Jakarta: UI Pers.

Zoest, Aart Van. 1992. *Semiotika : Tentang Tanda, Cara Kerjanya, Apa yang Kita Lakukan Dengannya*. Yayasan Sumber Agung.